

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kependudukan menjadi salah satu masalah serius yang harus segera ditangani, baik oleh pemerintah ataupun non pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik (2020) Provinsi Jawa Barat memiliki populasi penduduk sebanyak 49.405 juta jiwa atau sekitar 18% dari total penduduk di Indonesia. Permasalahan seperti pernikahan usia dini, angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang masih tinggi, dan laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi merupakan masalah penting yang tidak dapat dihindari.

Dengan adanya kepadatan dalam pemukiman penduduk, akan menimbulkan permasalahan kependudukan, diantaranya dampak sosial, dampak ekonomi, dampak lingkungan serta dampak politik. Arinda *et al* (2023) menyebutkan dalam studi literturnya bahwa dampak sosial dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, kurangnya akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Dampak ekonomi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi pada daerah-daerah yang memiliki tingkat penduduk yang berbeda. Dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jika pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan upaya pengelolaan sumber daya alam. Serta yang terakhir, dampak politik dimana tidak seimbangya kesempatan kerja, akses pendidikan dan kesehatan yang kurang dapat menimbulkan aksi di masyarakat sehingga dapat memicu aksi-aksi protes terhadap pemerintah.

Salah satu upaya yang pemerintah kita lakukan ialah dengan memiliki fokus dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB). Dengan dasar ini, pemerintah Indonesia juga membentuk organisasi atau lembaga, yakni, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Organisasi keluarga berencana dirintis pada tahun 1950-1956. Hingga pada tepatnya, pada tanggal 23 Desember 1957 dibentuklah Perkumpulan Keluarga Berencana di gedung Ikatan Dokter Indonesia. BKKBN senantiasa

memberikan program-program serta edukasi bagi masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dalam keluarga, seperti yang diprioritaskan pada tahun ini terdapat empat program utama, yaitu penurunan stunting, program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana), Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta yang termasuk dalam pembahasan kali ini yakni optimalisasi kampung berkualitas (kampung KB).

Berangkat dari hal itu, dalam mendukung program Keluarga Berencana, Kota Tasikmalaya menerbitkan Peraturan Walikota No. 84 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 1 dimana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan pengendalian penduduk, dan keluarga sejahtera. Sejalan dengan peraturan ini Nunung Kartini selaku ketua DPPKBP3A menyebutkan bahwa Tasikmalaya harus memiliki kesadaran dalam mengikuti program Keluarga Berencana (KB) sehingga capaian targetnya sendiri pada tiap kelurahan harus dibentuk Kampung Berkualitas (Kampung KB), Bams (2019).

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk kota Tasikmalaya mencapai 733.467 Jiwa. BPS (2023). Jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi peningkatan penduduk sebesar 1,32% dengan angka kelahiran total sebanyak 2,19 BPS (2020). Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat masih belum menyadari akan pentingnya program Keluarga Berencana (KB). Pemerintah berupaya untuk mensukseskan program KB dengan membuat masyarakat dapat ikut terlibat dan lebih partisipatif melalui program Kampung KB.

Kampung KB sendiri merupakan suatu usaha pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup dari masyarakat. Kampung KB dirancang sebagai salah satu strategi untuk mendukung Nawacita dalam agenda prioritas ke 3, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat ketahanan daerah dan desa dalam kerangka kesatuan”. Dalam kegiatannya sendiri, Kampung KB memiliki beberapa kegiatan pelaksanaan diantaranya kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga yang meliputi ketahanan dan keberdayaan keluarga serta adanya kegiatan lintas sektor seperti bidang sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Asisten pemerintahan dan Kesra kota Tasikmalaya Rachmat Riza Setiawan menuturkan bahwa kota Tasikmalaya memiliki 69 kelurahan dan pada saat ini baru 35 kelurahan sudah terbentuk Kampung KB Rizqy (2023), dimana salah satu daerah yang menjalankan program Kampung KB ini yaitu Kampung Sukapala yang terletak di Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Kampung KB di Sukapala pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Oktober 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Gununggede No. 440/06/2018 tentang Pembuatan dan Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana (KB) Sukapala di Wilayah RW 06 Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018.

BKKBN menyebutkan bahwa salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan suatu program di kampung KB adalah dengan mengamati program yang direncanakan dan dilaksanakan. Selain itu, salah satu prasyarat yang wajib dalam pembentukan kampung KB adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Tidak kalah pentingnya, peran dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program keluarga berencana, sangat diharapkan bahwa mereka dapat bekerja dengan baik untuk mencapai visi dan misi BKKBN. Seorang PLKB tidak hanya bertanggung jawab untuk meningkatkan pencapaian program KB Nasional, tetapi juga harus mengelola operasi lini lapangan untuk memastikan bahwa sumber daya penyuluh keluarga berencana lebih baik.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan salah satu fasilitator serta penyuluh dalam penyediaan fasilitas keluarga berencana, edukasi mengenai keluarga berencana, edukasi kontrasepsi dan lain

sebagainya. Setyowati *et al*, (2016, hlm. 173) menyebutkan, bahwa selain itu PLKB memiliki tugas tambahan yaitu Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan memberikan pembinaan kepada masyarakat yaitu bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina lingkungan keluarga (BKKBN, 2004), dimana peningkatan potensi sumber daya manusia yang harus diperhatikan, baik dari petugas lapangan keluarga berencana maupun dari tokoh masyarakatnya. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) juga harus bisa melaksanakan tugas serta bagaimana cara meningkatkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam suatu program.

Dengan adanya komitmen dari pemerintah, tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kependudukan serta adanya peran dan partisipasi masyarakat, hal itu sudah pasti dibutuhkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam suatu program atau kebijakan. Mubyarto dalam (Abidin, 2023, hlm.20) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan keinginan untuk membantu setiap program semaksimal mungkin, tanpa mengorbankan diri sendiri. Sedangkan menurut pendapat lainnya, partisipasi adalah proses keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan disini termasuk keterlibatan emosi, mental dan fisik dalam menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya untuk mendukung pencapaian dan tanggung jawab dalam semua keikutsertaan Dwiningrum dalam (Hutagalung 2022).

Berdasarkan temuan di lapangan, kampung keluarga berkualitas di Sukapala masih memerlukan partisipasi yang tinggi dari masyarakatnya. Selain itu, dengan adanya keterbatasan program serta persepsi masyarakat terhadap program di kampung keluarga berkualitas masih dipengaruhi oleh nilai keagamaan, dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kampung keluarga berkualitas sehingga terdapat masyarakat ada yang enggan untuk berpartisipasi.

Dengan hal itu, PLKB harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti suatu program atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dikarenakan aktif atau tidaknya partisipasi masyarakat dapat

menjadi penentu dalam sukses atau tidaknya suatu program. Sehingga, Petugas Lapangan Keluarga Berencana harus bisa memikirkan strategi, cara dan upaya yang bisa dilakukan untuk menarik partisipasi dari masyarakatnya. Menurut masyarakat Sukapala, PLKB kec. Kawalu harus bisa mengoptimalkan peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Dari permasalahan serta fenomena yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Program Kampung KB (Studi: Kampung KB Sukapala, Kelurahan Gununggede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil dari pemaparan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat di Kampung KB.
- b. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai program Kampung KB, dimana masyarakat masih mengira kalau dengan adanya program kampung KB, maka semua masyarakat harus memakai alat kontrasepsi.
- c. Persepsi masyarakat terhadap program kampung KB masih dipengaruhi keagamaan, yang dimana ada sebagian masyarakat yang menolak untuk di KB dengan alasan memutus rezeki karena ketidaktahuan mereka mengenai kampung KB.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan serta identifikasi yang telah ditentukan, maka diperoleh rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian, yaitu bagaimana peran petugas lapangan keluarga berencana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kampung keluarga berkualitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Petugas lapangan Keluarga Berencana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan teoretis

a. Bagi Peneliti

Penelitian dapat menambah wawasan, pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

b. Bagi Lembaga

Hasil dari studi ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pengembangan dalam melihat bagaimana peran PLKB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian dapat menambah wawasan, pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

b. Bagi Lembaga

Hasil dari studi ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pengembangan dalam melihat bagaimana peran PLKB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi mengenai peran PLKB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga diharapkan para petugas lapangan dan masyarakat bisa dapat menganalisis lebih lanjut dari hasil penelitian ini.

1.6 Definisi Operasional

a. Peran PLKB

Peran merupakan segala sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu dalam melakukan tugas sesuai dengan peranannya

sehingga aktivitas yang dikerjakan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi suatu program. Maksud peran dalam penelitian ini adalah bagaimana peran PLKB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kampung kb yang dilaksanakan di Sukapala Kec. Kawalu.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan proses keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan, salah satunya adalah kegiatan yang berada di kampung KB Sukapala. Partisipasi masyarakat yang dimaksud disini terkait dengan partisipasi berupa dana, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan dan buah pikiran, partisipasi sosial serta partisipasi dalam pengambilan keputusan.

c. Program Kampung KB

Kampung Kb merupakan salah satu inovasi pemerintah dalam bentuk peninjauan kembali kebijakan pemerintah, yang dimana didalamnya tidak hanya terfokus pada bagaimana cara untuk menekan laju penduduk, namun juga bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga. Di Sukapala, Kampung KB dibentuk sebagai upaya mengimplementasikan dan menerapkan delapan fungsi keluarga yang meliputi: fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi cinta kasih, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, serta fungsi sosial dan pendidikan.